



Strategi Komunikasi Pemerintah Bali dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks dan Hate Speech

Meilia Maria Della^{1*}, Tedi Erviantono², Nazrina Zuryani³

^{1,2,3} Universitas Udayana, Denpasar Bali

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4123>

*Correspondence: Meilia Maria Della

Email: meiliamardell@gmail.com

Received: 07-03-2025

Accepted: 16-04-2025

Published: 31-05-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

strengthen the social resilience of the community. The conclusion of this study confirms that the government's communication strategy which is inclusive, collaborative and based on local wisdom is a crucial element in building information resilience and maintaining social harmony amidst the uncontrolled flow of digital information.

Abstract: This study aims to analyze the communication strategies implemented by the Bali Provincial Government in countering the spread of hoaxes and hate speech through a local value-based approach. This research approach is qualitative with a literature study method that examines various policy documents, academic literature, and public communication practices carried out by local governments. The communication strategies identified in this study include community-based digital literacy education, optimizing the use of official government social media, a legal approach through synergy with law enforcement officers, and cross-sector collaboration involving traditional leaders, religious leaders, local media, and civil society organizations. The results of the study show that the effectiveness of public communication in Bali is greatly influenced by the government's ability to contextualize messages according to local cultural values such as Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, and Dharma teachings. The involvement of traditional leaders as social communicators also strengthens the credibility of the message and increases community participation. The narratives built are not only informative, but also persuasive and educational, emphasizing the importance of communication ethics and social responsibility in the digital space. In addition, efforts to build a collective narrative based on Balinese Hindu spirituality can strengthen the sense of togetherness and

Keywords: Public Communication, Hoax, Hate Speech, Digital Literacy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) melalui pendekatan berbasis nilai lokal. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi literatur yang mengkaji berbagai dokumen kebijakan, literatur akademik, serta praktik komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Strategi komunikasi yang diidentifikasi dalam kajian ini mencakup edukasi literasi digital berbasis komunitas, optimalisasi penggunaan media sosial resmi pemerintah, pendekatan hukum melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik di Bali sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengontekstualisasikan pesan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal seperti *Tri Hita Karana*, *Tat Twam Asi*, dan ajaran *Dharma*. Pelibatan tokoh adat sebagai komunikator sosial turut memperkuat kredibilitas pesan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Narasi yang dibangun bukan sekadar bersifat informatif, melainkan juga persuasif dan edukatif, dengan menekankan pentingnya etika berkomunikasi dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Selain itu, upaya membangun narasi kolektif berbasis spiritualitas Hindu Bali mampu memperkuat rasa kebersamaan dan memperkokoh ketahanan sosial masyarakat. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa strategi komunikasi pemerintah yang bersifat inklusif, kolaboratif, dan berbasis kearifan lokal merupakan elemen krusial dalam membangun ketahanan informasi serta menjaga harmoni sosial di tengah arus informasi digital yang tidak terkendali.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Hoaks, Ujaran Kebencian, Literasi Digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dunia ke dalam sebuah era baru yang ditandai dengan konektivitas tinggi, arus informasi yang cepat, dan transformasi digital dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Di tengah kemudahan tersebut, masyarakat modern dihadapkan pada tantangan besar berupa penyebaran hoaks (informasi palsu) dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang kian masif dan sulit dikendalikan (Sakti, 2020). Teknologi yang sejatinya dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia justru bisa menjadi alat yang memecah belah masyarakat jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, hal ini menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan strategis, terutama oleh pemerintah sebagai pengelola ruang publik dan penjaga stabilitas sosial (Haeba, 2024).

Hoaks dan ujaran kebencian bukan hanya masalah komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis, sosial, budaya, dan politik. Bagir, H., & Abdalla, U. A. (2020) menyebutkan bahwa era digital memfasilitasi kemunculan apa yang disebutnya sebagai *post-truth society*, di mana emosi dan opini lebih dominan daripada fakta. Dalam situasi ini, informasi yang menyesatkan dapat menyebar dengan lebih cepat daripada klarifikasi kebenarannya, terutama di ruang-ruang digital seperti media sosial, grup percakapan, dan forum daring. Hoaks sering kali menasar isu-isu sensitif seperti agama, suku, dan politik, sehingga dampaknya bukan hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial hingga konflik horizontal (Hashfi, & Andriyani, L. 2025).

Fenomena ini memiliki implikasi yang sangat serius, terlebih di wilayah-wilayah yang secara sosiologis memiliki keragaman dan dinamika sosial yang tinggi. Bali, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal luas sebagai destinasi pariwisata internasional, menyimpan potensi kerentanan terhadap isu ini. Keunikan Bali terletak pada kehidupan masyarakatnya yang masih sangat lekat dengan sistem adat dan spiritualitas Hindu (Japar, M. 2020). Desa adat, pura, dan sistem banjar menjadi pusat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun, di tengah tradisi yang kuat tersebut, Bali juga mengalami modernisasi yang pesat, terutama akibat interaksi dengan wisatawan mancanegara, migrasi penduduk, dan perkembangan teknologi (Wilantara, M. 2024). Heterogenitas inilah yang, meskipun menjadi kekayaan tersendiri, juga membuka peluang terjadinya gesekan sosial apabila isu-isu sensitif dimanipulasi oleh hoaks atau ujaran kebencian.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai aktor yang mampu merancang dan melaksanakan strategi komunikasi publik yang efektif, adaptif, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Pemerintah tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai komunikator dan fasilitator dalam menjaga keutuhan masyarakat (Silalah, U. 2023). Sejumlah penelitian telah menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam penanganan informasi negatif. Heryanto, (2020) menggarisbawahi bahwa strategi edukasi publik melalui media konvensional dan digital dapat menekan penyebaran hoaks apabila dilakukan secara konsisten dan partisipatif. Sementara itu, Musyafak, & Nisa, (2020) menyatakan bahwa kolaborasi lintas sector antara pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan organisasi keagamaan merupakan kunci dalam menciptakan ketahanan informasi di tingkat lokal.

Namun, strategi komunikasi pemerintah tidak dapat disamaratakan untuk semua daerah. Pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu efektif di wilayah lain, terutama ketika menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional. Bali, dengan karakteristiknya yang khas, menuntut strategi komunikasi yang bersifat kontekstual, yaitu yang mempertimbangkan struktur sosial adat, bahasa lokal, simbol-simbol keagamaan, serta cara berpikir masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai spiritualitas. Misalnya, upaya edukasi tentang bahaya hoaks bisa lebih efektif jika melibatkan pemuka adat (*bendesa*), tokoh agama Hindu, dan dilakukan melalui media yang dikenal dan dipercaya masyarakat setempat.

Sugita, & Pastika (2021) menjelaskan penggunaan media tradisional seperti *sekaa teruna*, *wayang kulit*, atau pertunjukan *bondres* yang dikemas dengan pesan-pesan edukatif bisa menjadi pendekatan yang tidak hanya komunikatif tetapi juga menghibur dan membunji. Strategi semacam ini telah terbukti ampuh dalam mentransformasikan pesan-pesan pemerintah agar lebih mudah diterima masyarakat di akar rumput. Dalam jangka panjang, upaya seperti ini juga bisa memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih resilien terhadap pengaruh negatif dari luar (Musyafak, & Nisa, 2020).

Di sisi lain, tantangan pemerintah dalam menjalankan strategi komunikasi ini juga tidak sedikit. Selain keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di beberapa wilayah, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan serius. Nurhaipah, T., & Ramallah, Z. (2024) menjelaskan masih banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi atau membedakan antara fakta dan opini. Oleh karena itu, upaya penanggulangan hoaks dan hate speech tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis seperti pemblokiran situs atau penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui program literasi digital yang berkelanjutan.

Peran generasi muda di Bali sebagai digital native juga harus dioptimalkan. Generasi muda yang aktif di media sosial dan memiliki kapasitas literasi teknologi dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi yang positif dan menangkal hoaks (Syukur, Y., & Putranto, T. 2020). Pemerintah perlu menggandeng komunitas kreatif, influencer lokal, dan lembaga pendidikan dalam merancang kampanye digital yang menarik, relevan, dan memiliki muatan lokal. Dengan demikian, strategi komunikasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat menjadi bagian aktif dalam menjaga ruang digital yang sehat dan produktif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi komunikasi pemerintah, khususnya di Bali, dirancang dan diimplementasikan dalam menghadapi tantangan era digital yang ditandai dengan masifnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu komunikasi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis kearifan lokal. Pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek informasi, tetapi juga membangun

pemahaman budaya dan spiritualitas lokal akan menjadi kunci dalam menciptakan tatanan masyarakat digital yang sehat, damai, dan harmonis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan pemerintah, serta laporan-laporan resmi dari instansi terkait, khususnya yang berhubungan dengan strategi komunikasi publik, penanggulangan hoaks, dan ujaran kebencian di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menginterpretasikan berbagai konsep dan temuan dari literatur yang ada untuk merumuskan strategi komunikasi yang telah dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan memusatkan kajian pada data sekunder yang bersifat dokumentatif dan konseptual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengeksplorasi pendekatan komunikasi pemerintah dalam konteks sosial budaya masyarakat Bali.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tantangan serius dalam era digital yang sarat informasi. Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari struktur pemerintahan Indonesia menghadapi tekanan untuk mengelola arus informasi secara efektif guna menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keamanan daerah (Wangke, H. 2021). Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Bali dalam menangkal hoaks dan hate speech bersifat multidimensi. Berikut ini adalah rincian dari strategi-strategi tersebut:

1. Edukasi Literasi Digital Berbasis Komunitas

Salah satu strategi utama Pemerintah Provinsi Bali dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian adalah melalui edukasi literasi digital berbasis komunitas. Menurut Syafrial, H. (2023) literasi digital tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan teknis untuk mengakses dan menggunakan teknologi informasi, melainkan juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai, memilah, dan menyebarkan informasi yang beredar di ruang digital. Dalam implementasinya, strategi ini tidak dilakukan secara top-down, tetapi mengandalkan partisipasi aktif masyarakat lokal dengan memanfaatkan kekuatan struktur sosial Bali yang berbasis pada desa adat. Pemerintah, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos), melibatkan langsung lembaga adat seperti Majelis Desa Adat (MDA) dalam penyuluhan literasi digital yang menysasar hingga ke tingkat banjar dan keluarga. Sinergi ini memungkinkan penyebaran pesan edukatif menjadi lebih kontekstual dan efektif, karena disampaikan oleh figur-figur yang sudah dipercaya oleh komunitas.

Puteri, & Sari, (2024) dalam jurnalnya menjelaskan Kampanye "Saring Sebelum Sharing" menjadi salah satu program unggulan yang digaungkan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Kampanye ini dilakukan melalui pelatihan langsung di desa, seminar daring, hingga penyuluhan kreatif di media sosial. Di beberapa desa, penyuluhan bahkan dikombinasikan dengan kegiatan seni dan budaya seperti pementasan wayang atau bondres (lawakan tradisional) yang disisipi pesan-pesan edukatif. Hal ini menunjukkan bagaimana pendekatan lokal dan budaya dapat digunakan secara strategis untuk membangun kesadaran digital di masyarakat.

Kelompok sasaran utama dari strategi ini adalah generasi muda dan kelompok lanjut usia. Generasi muda menjadi target penting karena mereka merupakan pengguna aktif media sosial dan lebih rentan terhadap penyebaran hoaks (Haqi, N. T., 2025). Pelatihan untuk kelompok ini dilakukan dalam bentuk workshop kreatif konten digital, pelibatan komunitas kampus, serta kolaborasi dengan influencer lokal yang memiliki pengaruh di media sosial. Di sisi lain, kelompok lansia yang tergolong digital imigran juga menjadi perhatian, dengan penyuluhan yang dilakukan secara sederhana dan interpersonal, melibatkan kader PKK, relawan desa, dan perangkat adat. Pelibatan lintas generasi ini menciptakan ruang pembelajaran yang saling melengkapi dan memperkuat solidaritas sosial.

Di ruang digital, akun-akun media sosial resmi milik pemerintah seperti Instagram dan Facebook Diskominfo Bali menjadi saluran utama untuk menyebarkan konten edukatif. Materi yang disampaikan dikemas dalam bentuk visual menarik seperti infografis, video pendek, dan meme edukatif yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Pemerintah juga menggandeng komunitas kreatif lokal dan media online untuk memperluas jangkauan informasi, menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam strategi komunikasi publik. Seperti yang dikemukakan oleh Gerung, J. (2021), keterlibatan aktor informal seperti tokoh budaya, komunitas kreatif, dan jurnalis lokal menjadi faktor kunci keberhasilan penyampaian pesan yang tepat sasaran.

Meskipun demikian, pelaksanaan strategi ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kesenjangan literasi digital antara masyarakat kota dan desa, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memverifikasi informasi. Untuk itu, evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dijalankan serta peningkatan kapasitas para fasilitator lokal menjadi langkah penting agar strategi ini dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak jangka panjang. Dengan memadukan kekuatan budaya lokal, jejaring sosial komunitas, dan teknologi digital, Bali menunjukkan bahwa edukasi literasi digital dapat diimplementasikan secara kontekstual dan berakar pada kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

2. Optimalisasi Media Sosial Pemerintah sebagai Kanal Resmi Informasi

Strategi komunikasi publik Pemerintah Provinsi Bali dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya diwujudkan melalui edukasi berbasis komunitas, tetapi juga melalui optimalisasi kanal media sosial resmi sebagai saluran penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya (Saidah, M. 2023).

Di tengah era disrupsi informasi yang ditandai dengan derasnya arus konten digital dan rendahnya literasi media sebagian masyarakat, kehadiran negara dalam ruang digital menjadi sangat vital. Seperti yang ditegaskan oleh Rochana, E. (2020), kanal komunikasi resmi pemerintah memiliki peran krusial sebagai penangkal narasi destruktif serta sebagai sumber rujukan utama di tengah kekacauan informasi. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan secara aktif berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter (kini X), dan Facebook untuk menyampaikan klarifikasi isu, merespons dinamika publik, serta membentuk narasi damai yang sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Bali.

Salah satu contoh konkret dari optimalisasi ini adalah akun Instagram resmi @diskominfoBali, yang secara rutin memublikasikan klarifikasi terhadap hoaks, penyuluhan literasi digital, serta informasi kebijakan publik dalam format yang menarik dan mudah dipahami. Penggunaan media visual seperti infografis, video pendek, dan storytelling berbasis budaya lokal menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan pesan secara efektif. Lokantara (2020) visualisasi informasi berbasis kearifan lokal ini tidak hanya memperkuat daya tarik konten, tetapi juga membangun koneksi emosional antara pemerintah dan masyarakat, mengingat karakter budaya Bali yang sangat menghargai simbol, narasi, dan estetika visual. Strategi ini sekaligus menjadi bentuk inovasi dalam komunikasi publik, di mana pesan-pesan pemerintahan tidak lagi disampaikan dalam gaya formal dan birokratis, melainkan dalam bahasa visual yang relevan dengan gaya hidup digital masyarakat kontemporer.

Selain fungsi informatif dan klarifikasi, kanal media sosial pemerintah juga berfungsi sebagai sarana engagement publik. Respons cepat terhadap komentar masyarakat, polling interaktif, hingga sesi tanya jawab langsung dengan pejabat publik merupakan bentuk partisipasi dua arah yang memperkuat hubungan antara institusi pemerintah dan warga. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust), terutama dalam menangani isu-isu sensitif yang rawan menimbulkan misinformasi dan keresahan sosial. Studi Laksmono, R., & Nurhaliza, E. (2025) menunjukkan bahwa kehadiran aktif pemerintah di ruang digital merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ruang publik yang sehat dan demokratis, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap dominasi narasi-narasi non-resmi yang sering kali bersifat provokatif atau manipulatif.

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada tiga faktor utama: konsistensi, kecepatan merespons, dan kredibilitas konten. Pemerintah Bali telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek-aspek tersebut, di mana setiap isu yang berkembang di masyarakat seperti hoaks vaksin, konflik adat, hingga isu politik lokal ditanggapi secara sistematis melalui unggahan klarifikasi dan pernyataan resmi di media sosial. Di saat bersamaan, pemerintah juga berupaya menyampaikan narasi yang menenangkan, bukan sekadar membantah, tetapi juga menjelaskan konteks secara humanis dan edukatif. Ini menunjukkan bahwa

komunikasi digital pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan strategis.

Tidak semua masyarakat menjadikan akun resmi pemerintah sebagai sumber utama informasi, terutama karena algoritma media sosial cenderung memunculkan konten dari sumber yang lebih sensasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan penguatan kapasitas digital, memperluas jejaring kolaborasi dengan komunitas kreatif dan media lokal, serta mengembangkan strategi amplifikasi konten melalui iklan sosial (social ads) dan kerja sama dengan tokoh-tokoh publik yang kredibel. Dengan cara ini, kanal komunikasi digital pemerintah tidak hanya hadir sebagai penyeimbang informasi, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membentuk ruang digital yang sehat, edukatif, dan inklusif.

3. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Pengawasan Informasi

Meskipun pendekatan persuasif dan edukatif menjadi tulang punggung strategi komunikasi publik di era digital, Pemerintah Provinsi Bali juga tidak mengabaikan pendekatan hukum dalam menanggulangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Langkah ini menjadi bagian dari strategi komprehensif dalam menjaga ketertiban informasi dan keamanan sosial, terutama di daerah seperti Bali yang memiliki sensitivitas budaya dan agama yang tinggi. Pemerintah Bali secara aktif berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) dalam melakukan identifikasi, pelaporan, dan penindakan terhadap akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi palsu maupun konten provokatif yang mengandung unsur kebencian. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah turut mendukung pelacakan digital dan penindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang menyebarkan hoaks dengan muatan politis, etnis, dan agama yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Literatur menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki efek jera (deterrent effect) yang signifikan, terutama dalam menciptakan persepsi bahwa ruang digital tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan hukum. Tis'ah (2022) menegaskan bahwa publikasi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penyebaran hoaks memiliki fungsi preventif sekaligus edukatif, karena menunjukkan bahwa pelanggaran etika informasi memiliki konsekuensi nyata. Dalam konteks Bali, strategi ini dijalankan bersamaan dengan kampanye penyadaran hukum yang berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Pemerintah daerah, melalui Diskominfo, juga menyebarluaskan informasi seputar UU ITE secara berkala di media sosial, dengan penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat prinsip kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari.

Penerapan pendekatan hukum ini tidak lepas dari perdebatan dan kritik, khususnya terkait potensi pelanggaran atas kebebasan berekspresi. Sejumlah peneliti seperti Setiyono, B. (2023) mengingatkan bahwa strategi penindakan hukum yang

terlalu represif justru dapat menimbulkan efek negatif, seperti munculnya ketakutan untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik. Jika tidak dikelola secara proporsional, pendekatan hukum dapat menciptakan atmosfer komunikasi yang tertutup, mengurangi ruang diskusi publik yang sehat, serta menghambat partisipasi warga dalam pembangunan demokrasi digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak sipil, dengan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil benar-benar proporsional, transparan, dan berbasis bukti kuat.

Keseimbangan ini juga dapat diwujudkan dengan cara memperkuat mekanisme klarifikasi sebelum penindakan, memberikan ruang mediasi digital, serta membangun saluran aduan publik yang transparan dan responsif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat pemerintah sebagai otoritas penindak, tetapi juga sebagai fasilitator ruang publik yang aman, adil, dan mendukung dialog yang konstruktif. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip hak digital dan kebebasan berekspresi menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Melalui kombinasi antara pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan edukatif yang inklusif, Bali dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakatnya.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Efektivitas strategi komunikasi publik dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang solid dan terstruktur. Dalam konteks Provinsi Bali, kolaborasi antara pemerintah daerah, media lokal, tokoh adat, pemuka agama, serta komunitas budaya menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem komunikasi yang resilien dan berakar pada nilai-nilai lokal. Pemerintah Bali tidak hanya berperan sebagai produsen informasi atau komunikator tunggal, melainkan juga sebagai fasilitator dialog sosial, yang menjembatani komunikasi antara berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kesepahaman dan harmoni. Pendekatan kolaboratif ini dipandang sebagai bentuk implementasi dari prinsip demokrasi partisipatif dalam komunikasi publik, di mana kekuatan narasi tidak dimonopoli oleh negara, tetapi disebarkan secara kolektif oleh aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat.

Media lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam strategi ini. Lembaga pers seperti Bali Post, Denpasar Post, dan Bali TV secara aktif menyampaikan informasi klarifikasi, berita edukatif, serta narasi damai yang dapat meredam potensi konflik. Karena memiliki jangkauan luas dan kedekatan kultural dengan masyarakat Bali, media lokal mampu menyampaikan pesan dalam gaya bahasa dan sudut pandang yang lebih diterima publik dibanding media nasional. Tidak hanya itu, media lokal juga menjadi ruang interaksi dan ekspresi warga, serta jembatan antara kebijakan pemerintah dan respons masyarakat. Abdullah, S. (2025) kepercayaan masyarakat terhadap media lokal ini menjadikannya mitra krusial pemerintah dalam mengedukasi publik serta memerangi disinformasi secara masif dan konsisten.

Selain media, tokoh adat dan pemuka agama Hindu di Bali turut menjadi ujung tombak dalam membangun komunikasi yang menyejukkan dan menyatukan. Struktur masyarakat Bali yang masih kuat dipengaruhi oleh lembaga adat seperti desa Pakraman dan majelis desa adat, memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk membangun kerja sama yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan penting. Tokoh-tokoh ini bukan hanya simbol moralitas dan tradisi, tetapi juga memiliki pengaruh sosial yang kuat sehingga pesan yang disampaikan oleh mereka lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam berbagai kampanye literasi digital dan antikekerasan, tokoh adat seringkali diikutsertakan dalam forum dialog, media penyuluhan, hingga dalam produksi konten media yang berbasis budaya.

Menurut Herminingrum, S. (2021) salah satu pendekatan yang banyak didiskusikan dalam literatur komunikasi adalah komunikasi berbasis nilai lokal, yaitu strategi penyampaian pesan publik yang dikemas dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan moral dan budaya. Di Bali, pendekatan ini direalisasikan melalui integrasi nilai-nilai Hindu seperti *dharma* (kebenaran dan tanggung jawab moral), *karma phala* (hukum sebab-akibat atas perbuatan), dan *tat twam asi* (nilai kesetaraan dan empati antarmanusia). Ketika kampanye digital atau penyuluhan lapangan menyisipkan pesan-pesan ini, maka komunikasi tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga emosional dan spiritual—menyentuh nilai-nilai mendalam yang telah hidup dalam budaya masyarakat Bali selama berabad-abad. Pendekatan ini terbukti lebih persuasif dan memiliki dampak jangka panjang karena tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat, melainkan memperkuatnya.

Melalui kolaborasi ini, strategi komunikasi di Bali menjadi lebih holistik dan kontekstual, karena tidak hanya mengandalkan kekuatan teknologi informasi, tetapi juga memanfaatkan struktur sosial, budaya, dan agama yang sudah mapan. Pemerintah menyadari bahwa tantangan komunikasi di era digital bukan hanya soal kecepatan distribusi informasi, tetapi juga soal kualitas pesan dan siapa yang menyampaikannya. Oleh karena itu, integrasi nilai lokal dan kolaborasi multipihak bukan hanya strategi pelengkap, melainkan strategi inti dalam membangun ketahanan sosial terhadap disinformasi dan ujaran kebencian. Kolaborasi yang kuat juga menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pemerintah, sehingga masyarakat tidak sekadar menjadi objek penerima informasi, tetapi juga subjek aktif yang turut menjaga ruang digital dan sosial mereka tetap sehat dan damai.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian bersifat holistik dan adaptif terhadap karakteristik lokal masyarakat. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan informatif melalui kanal resmi digital, tetapi juga melibatkan komunitas adat, tokoh agama, dan media lokal untuk memperkuat pesan edukatif. Pendekatan edukasi

literasi digital dilakukan secara partisipatif, melibatkan generasi muda dan lansia dengan metode berbasis budaya lokal. Optimalisasi media sosial sebagai kanal komunikasi publik memungkinkan respons cepat terhadap disinformasi serta memperkuat hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pendekatan hukum diterapkan secara selektif dan proporsional untuk memberikan efek jera, namun tetap menjaga prinsip kebebasan berekspresi. Kolaborasi lintas sektor dan integrasi nilai-nilai lokal seperti *dharma*, *tat twam asi*, dan *karma phala* menjadikan strategi ini kontekstual dan berdampak jangka panjang. Dengan demikian, Pemerintah Bali menunjukkan bahwa komunikasi publik berbasis kearifan lokal merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat digital yang resilien, inklusif, dan harmonis.

Saran

Penelitian ini menyarankan agar strategi komunikasi pemerintah dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian terus dikembangkan dengan memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah, komunitas adat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan. Pelibatan generasi muda sebagai agen literasi digital berbasis budaya lokal perlu lebih dioptimalkan guna meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan. Untuk praktik lapangan, pemerintah daerah disarankan membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada isu hoaks dan hate speech berbasis komunitas adat, dengan pendekatan edukatif dan restoratif. Selain itu, penggunaan media sosial resmi perlu didesain lebih interaktif dan partisipatif, agar tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi strategi komunikasi tersebut melalui pendekatan lapangan, seperti studi kasus atau etnografi digital, guna menangkap dinamika partisipasi masyarakat secara lebih detail. Penelitian mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap komunikasi pemerintah yang berbasis budaya lokal juga penting dilakukan untuk menilai tingkat keberterimaan pesan yang disampaikan. Selain itu, studi komparatif antara daerah lain yang juga kaya budaya lokal dapat memperluas pemahaman tentang pola komunikasi berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan disinformasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., Widyastuti, T. A. R., Suharyanto, C. E., Januru, L., Safii, M., Santioso, L. L., ... & Faqihuddin, A. (2025). *Pemberdayaan Media Cyber di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Bagir, H., & Abdalla, U. A. (2020). *Sains Religius, Agama Saintifik*. Mizan Publishing.
- Gerung, J. (2021). *Media Sosial dalam Digital Marketing Kesehatan*. Guepedia.
- Haeba, I. D., Thoha, A. M., & Ahim, R. (2024). Wacana Dinamis Nahdlatul Ulama: Analisis Kritis Terhadap Perubahan Sosial: Nahdlatul Ulama's Dynamic Discourse: A Critical Analysis Of Social Change. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 125-158.
- Haqi, N. T., Ningrum, A., Hardiana, L. B., Pahlepi, H., & Suciramadhan, A. (2025). Propaganda Politik yang Banyak Beredar di Media Periklanan Maupun Media Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(4), 645-650.

- Hashfi, M. S. F., & Andriyani, L. (2025). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menghadapi Isu Politik Identitas Pada Pemilu 2024 Di Jakarta Selatan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(10), 51-60.
- Herminingrum, S. (2021). *Kearifan lokal masyarakat tradisional Gunung Kelud*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Heryanto, G. G. (2020). *Realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer*. IRCiSoD.
- Japar, M., Syarifa, S., & Fadhillah, D. N. (2020). *Pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal*. Jakad Media Publishing.
- Laksmono, R., & Nurhaliza, E. (2025). Transformasi Jurnalisme dalam Ruang Publik Digital. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(02), 65-75.
- Lokantara, I. G. W. (2020). *Membangun Ruang Kreatif Di Era Digital Memberdayakan Ide, Kreativitas, Dan Potensi*. Deepublish.
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai dalam Konflik Agama*. Penerbit Lawwana.
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai dalam Konflik Agama*. Penerbit Lawwana.
- Nurhaipah, T., & Ramallah, Z. (2024). Literasi media dalam menangkal informasi hoaks jelang kontestasi politik 2024. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(2), 100-111.
- Puteri, N. L. W. E., & Sari, G. A. P. D. P. (2024). Pengembangan Kapasitas Literasi Digital Bagi Guru Dan Siswa Di Desa Umajero, Kabupaten Buleleng. *PANAKAWAN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 38-45.
- ROCHANA, E. (2020). Kelentingan keluarga menghadapi pandemi covid-19. *Covid19 Disrupsi*.
- Saidah, M. (2023). *Public Relations Di Era Digital: Menavigasi Media Sosial Dan Teknologi Baru*. Deepublish.
- Sakti, M. N. S. F. (2020). *Moslem Social Media 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Setiyono, B. (2023). Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi. Nuansa Cendekia.
- Silalah, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. uwais inspirasi indonesia.
- Sugita, I. W., & Pastika, I. G. T. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung Dalam Paribasa Bali Suguhan Pertunjukan Wayang Kulit Cenk Blonk. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(1), 65-93.
- Syafrial, H. (2023). *Literasi digital*. Nas Media Pustaka.
- Syukur, Y., & Putranto, T. (2020). *Muslim 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Tis'ah, J. A. R. H. (2022). *Kejahatan Berbahasa (Language Crime)*. Langgam Pustaka.
- Wangke, H. (2021). *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wilantara, M. (2024). *Rekonstruksi Komunikasi Pariwisata Bali Mengubah Pandangan Budaya Dari Globalitas Ke Lokalitas*. Deepublish.